

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia maka pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sebagai tindak lanjut dari apa yang diamanatkan oleh Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.¹

Pada pelaksanaannya, ada berbagai strategi yang dilakukan oleh lembaga sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan diantaranya; dengan melengkapi fasilitas pendidikan dan infrastruktur, menyediakan layanan pendidikan yang baik, jaminan kesehatan dan keselamatan selama di sekolah, mengadakan kegiatan ekstrakurikuler, pelatihan-pelatihan yang mengasah kemampuan sosial, dan lain-lain. Peningkatan mutu pendidikan tersebut tentunya membutuhkan biaya dalam pelaksanaannya.

Menurut nanang fatah dalam penelitiannya besaran biaya yang dikeluarkan berpengaruh terhadap kualitas pendidikan di sekolah dan proses belajar-mengajar serta kualitas *outcomes* yang dihasilkan.² Artinya ada korelasi yang positif antara besarnya biaya pendidikan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Oleh karena itu untuk menetapkan biaya satuan

¹ Depdiknas ,2003, Undang-undang RI No.20 tahun 2003. Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

² Fattah, dkk, 2004, *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya) hlm 3

pendidikan memerlukan perencanaan yang tepat antara sumber dana dan pengeluarannya.

Penetapannya biaya satuan pendidikan didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar. Hal tersebut juga harus dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah.³

Pada dasarnya biaya pendidikan sudah diatur oleh pemerintah baik sumber maupun peruntukannya. Pada madrasah negeri seluruh biaya pendidikannya ditanggung oleh pemerintah, Pada madrasah swasta pemerintah tidak memberikan bantuan secara penuh, melainkan bantuan berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah). Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan permendikbud no 44 tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar pemerintah memutuskan bahwa diperbolehkan bagi lembaga pendidikan swasta untuk mengambil iuran dari peserta didik yang peruntukannya meliputi; biaya investasi, biaya operasi, bantuan biaya pendidikan, dan beasiswa dengan jumlah tidak lebih dari 5 milyar pertahun, jumlah iuran yang dihimpun harus diaudit oleh akuntan publik dan hasilnya diumumkan secara transparan. Diharapkan melalui permendikbud tersebut pihak sekolah dapat

³ Depdiknas, Permendikbud No. 44 tahun 2012

meningkatkan mutu dan pelayanan pendidikannya. Besaran iuran yang dibebankan pada siswa tentunya tidak boleh melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Sebagai pihak pengelola keuangan madrasah, bendahara umum dan staff tata usaha wajib menjaga amanah yang telah diberikan, seperti yang telah diajarkan dalam islam terkait etika pengelola keuangan harus memiliki sifat amanah agar tidak merugikan dirinya, orang lain, dan Negara. Seperti yang difirmamankan oleh Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al-Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal 8: Ayat 27).⁴

Sekolah sebagai lembaga pendidikan membutuhkan informasi mengenai biaya sebagai bahan pertimbangan untuk pelaksanaan efisiensi biaya. Biaya pendidikan berperan dalam mewujudkan mutu pendidikan dengan dijadikan sebagai acuan untuk menilai efisiensi pelaksanaan pendidikan. Akurasi penetapan biaya pendidikan diperlukan untuk mengetahui apakah kegiatan yang dilakukan oleh sekolah sudah terlaksana dengan efektif dan efisien atau belum. Selain itu, analisis biaya juga dapat digunakan sebagai bahan untuk menganalisis pos mana saja yang terjadi

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, 2016, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia), hlm.

inefisiensi biaya. Oleh karena itu, sekolah sebagai lembaga pendidikan perlu mengetahui informasi mengenai biaya pendidikan secara jelas sebagai dasar pengambilan keputusan.

Dewasa ini, penentuan biaya pendidikan di sekolah masih berdasarkan cara tradisional. Sekolah sebagai lembaga nonprofit seharusnya mempertimbangkan baik-baik mengenai penetapan anggaran biaya pendidikan. Penentuan biaya pendidikan yang tidak tepat akan menyebabkan terjadinya *overcosting* atau *undercosting*⁵.

Penentuan biaya yang lebih akurat dapat membantu pemerintah dalam menentukan besarnya bantuan operasional yang akan dianggarkan untuk setiap siswa. *Variable Costing* adalah metode perhitungan akuntansi dimana harga pokok yang hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk⁶. Dengan menggunakan metode *Variable Costing*, selain berguna bagi pengambilan keputusan, metode ini juga dapat digunakan untuk menentukan jumlah biaya yang harus dibebankan oleh sekolah kepada siswa berdasarkan elemen biaya kegiatan yang dilakukan. Informasi ini akan berguna untuk mengetahui apakah biaya yang dibebankan kepada siswa sudah pas, berlebihan, atau kurang.

Informasi pengelolaan biaya dan peningkatan efisiensi merupakan komponen penting yang menjadi harapan masyarakat. Sekolah membutuhkan informasi biaya sebagai salah satu dasar pelaksanaan efisiensi. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk

⁵ Horngren, dkk, 2006, *Cost Accounting A Managerial Emphasis Twelfth Edition*. (New Jersey: Pearson International Edition) hlm. 161.

⁶ Mulyadi, *Akuntansi Biaya: Penentuan Harga Pokok Produk dan Pengendalian Biaya*. Edisi 3, (Yogyakarta: BPFE, 1986), hlm 63

mengetahui perbandingan hasil perhitungan biaya pendidikan per siswa per Paket Keahlian per bulan di MTs Bustanul Ulum dengan dua metode yang berbeda.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, maka peneliti berkeinginan untuk menghitung harga pokok biaya satuan pendidikan di MTs Bustanul Ulum dan menuliskannya dalam judul **“Optimalisasi Biaya Satuan Pendidikan Dengan Metode Variabel Costing Sebagai Penentu Dana Kegiatan Studi Pada MTs Bustanul Ulum Blitar”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan penentuan biaya satuan pendidikan pada MTs Bustanul Ulum?
2. Bagaimana perhitungan biaya satuan pendidikan siswa menggunakan metode Variable Costing di MTs Bustanul Ulum Blitar?
3. Apakah penentuan biaya satuan pendidikan yang dilakukan oleh MTs Bustanul Ulum sudah optimal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan yang digunakan oleh di MTs Bustanul Ulum dalam penentuan biaya satuan pendidikan
2. Untuk menghitung biaya satuan pendidikan siswa menggunakan metode Variabel Costing di MTs Bustanul Ulum Blitar
3. Untuk mendeskripsikan tingkat optimalisasi penentuan dana kegiatan di MTs Bustanul Ulum Blitar

D. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah optimalisasi perhitungan biaya satuan pendidikan meliputi biaya pelaksanaan kegiatan PHBI dan PHBN serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan yang dihitung berdasarkan jumlah biaya yang ditetapkan untuk tahun pembelajaran 2019 sampai 2020 dengan menggunakan metode variabel costing untuk menentukan dana kegiatan studi pada MTs Bustanul Ulum Blitar.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Guna mengembangkan ilmu akuntansi biaya terutama pada bagian perhitungan biaya satuan pendidikan dengan tujuan sebagai penentu dana dana kegiatan studi.

2. Secara Praktis

- a. Bagi pihak lembaga, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk mengevaluasi dan menentukan kebijakan selanjutnya pada penentuan biaya satuan pendidikan.
- b. Bagi pihak akademis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat serta sumbangsih untuk meningkatkan wawasan keilmuan dan menjadi salah satu rujukan dalam kegiatan pembelajaran.
- c. Bagi peneliti kedepannya, diharapkan penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan dan bahan pertimbangan bagi penelitian serupa.

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Optimalisasi

Optimalisasi adalah ketika hasil yang dicapai sesuai dengan yang diinginkan, optimalisasi merupakan pencapaian hasil yang sesuai harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi dapat juga diartikan sebagai tolak ukur apabila kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

b. Biaya Satuan Pendidikan

bahwa biaya satuan (unit cost) pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh setiap siswa dalam periode tertentu untuk mendapatkan layanan pendidikan. Biaya satuan (unit cost) dapat dijadikan sebagai standart dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan siswa disekolah Biaya satuan persiswa merupakan biaya rata-rata satu orang siswa yang dihitung dari total pengeluaran sekolah dibagi seluruh siswa yang ada di sekolah dalam periode tertentu. Dengan mengetahui besaran biaya satuan persiswa menurut jenjang dan jenis pendidikan berguna untuk menilai berbagai pilihan kebijakan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

c. Variabel Costing

Variabel costing adalah metode akuntansi manajemen yang dipakai untuk menghitung biaya produk. Laporan laba rugi yang dihasilkan oleh system variable costing memperlihatkan margin kontribusi barang-barang yang dihasilkan, informasi yang sangat berfaedah dalam pengambilan keputusan. Variable costing kadangkala disebut juga direct costing (penentuan biaya pokok langsung) atau marginal costing (penentuan biaya pokok marginal). Dalam metode penentuan biaya pokok variable (variable costing, hanya biaya-biaya produksi variable saja yang dimasukkan dalam persediaan dan biaya pokok penjualan.

d. Dana Kegiatan Madrasah

Dana adalah himpunan dari uang dalam jumlah tertentu dalam bentuk tunai maupun nontunai. Dana juga merupakan komponen utama dari

analisis sebuah bisnis. Dalam artian yang lebih luas, dana juga bisa berarti modal usaha dalam menjalankan bisnis.

Madrasah Tsanawiyah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri dari 3 (tiga) tingkat pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari Sekolah Dasar, MI atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara Sekolah Dasar atau MI.

Pendidikan madrasah tsanawiyah ditempuh dalam waktu 3 tahun, mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Murid kelas 9 diwajibkan mengikuti Ujian Nasional yang memengaruhi kelulusan siswa. Lulusan MTs dapat melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah sama dengan kurikulum sekolah menengah pertama, hanya saja pada MTs terdapat porsi lebih banyak mengenai pendidikan agama Islam. Selain mengajarkan mata pelajaran sebagaimana sekolah dasar, juga ditambah dengan pelajaran-pelajaran seperti: Al Quran.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi konseptual diatas, maka dapat disusun definisi operasionalnya adalah sebagai berikut :

Dana kegiatan madrasah merupakan penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk keperluan pembelajaran siswa serta sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi madrasah dengan dana yang sesuai kebutuhan. Alokasi dana kegiatan madrasah diharapkan dapat efektif

untuk menganggarkan dana kegiatan madrasah serta dapat diterapkan semaksimal mungkin untuk melaksanakan kegiatan madrasah dengan anggaran sesuai dengan kebutuhan. Optimalisasi adalah ketika hasil yang dicapai sesuai dengan yang diinginkan, optimalisasi merupakan pencapaian hasil yang sesuai harapan secara efektif dan efisien Alokasi Dana Kegiatan Madrasah adalah untuk mengurangi atau meminimalisir penganggaran biaya satuan pendidikan yang berlebihan sehingga berpotensi menyalahi aturan dari pemerintah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sebagai upaya untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini, peneliti menyajikan ke dalam tiga bagian yaitu bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Masing-masing bagian terdiri dari beberapa sub bagian sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian awal dari penelitian ini meliputi halaman sampul depan (cover), halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar bagan, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian utama

Bagian utama ini terbagi menjadi enam bab diantaranya :

- a) BAB I yang berisi pendahuluan, menjelaskan serangkaian awal maksud dan tujuan penelitian yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

batasan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

- b) BAB II yang berisi landasan teori, merupakan penjelasan mengenai teori-teori tentang Biaya Satuan Pendidikan, Optimalisasi, Peraturan Menteri Pendidikan no 44 tahun 2012 dan Alokasi Dana Kegiatan Madrasah yang dijadikan referensi dalam membahas hasil penelitian, kajian penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.
- c) BAB III yang berisi metode penelitian, merupakan penjelasan mengenai jenis penelitian dan teknik analisis yang digunakan, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.
- d) BAB IV yang berisi hasil penelitian, merupakan temuan peneliti mengenai permasalahan penelitian yang berupa data hasil wawancara dan data-data dokumentasi yang diperoleh dari MTs Bustanul Ulum Blitar.
- e) BAB V yang berisipembahasan, merupakan penjelasan dan pemaparan terkait data penelitian dan hasil analisis data.
- f) BAB VI yang berisi penutup, yang menjelaskan hasil akhir atau kesimpulan dari pembahasan permasalahan sekaligus pemberian saran bagi pihak-pihak terkait, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

3. Bagian akhir, terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup